BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu negara dapat dilihat dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Negara dengan tingkat perekonomian yang baik tidak akan terlepas dari peran lembaga keuangan. Adanya lembaga keuangan akan membuat sebuah negara menjadi lebih baik. Lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan mikro selain bank yang berperan dalam pembangunan ekonomi daerah di Bali adalah Lembaga Perkreditan Desa. Suartana (2009), menyatakan LPD pertama kali didirikan pada tahun 1985, berdirinya LPD ini membantu masyarakat memperoleh dana. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menjadi sebuah lembaga keuangan Desa Pakraman yang telah berkembang dan memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan budaya kepada para anggotanya.

LPD menjadi lembaga keuangan yang sangat diminati masyarakat sebagai sumber pendanaan. Fungsi dan tujuan LPD yaitu memberikan peluang usaha bagi warga desa setempat, kemudian menyerap tenaga kerja dari desa ke desa, dan memfasilitasi transaksi pembayaran. Dewi dan Putri (2014), menyatakan LPD dengan pengelolaannya yang sederhana mampu memberi manfaat bagi masyarakat baik dalam memberikan pelayanan yang lebih mudah, memberi pelayanan dalam berbagai sektor, serta sebagian keuntungan pada LPD digunakan untuk mendanai kegiatan yang ada di

desa adat. LPD dimiliki oleh krama desa di wilayah tertentu dan terikat oleh adat dan budaya desa telah memberi manfaat sosial, ekonomi, dan budaya kepada anggotanya, sehingga perlu dibina, ditingkatkan kinerjanya dan diperkuat serta dilestarikan keberadaannya. Pengukuran kinerja LPD penting dilakukan agar LPD mampu untuk bersaing tidak hanya dari perspektif keuangannya saja, namun agar dapat mempertahankan nasabah yang dimiliki, mengetahui keinginan nasabah, melakukan inovasi baik dalam bidang teknologi yang diberikan oleh pihak LPD. Dengan pengukuran kinerja LPD penting dilakukan untuk mengetahui informasi atas efisiensi serta efektifitas sumber daya yang digunakan dalam proses penciptaan barang dan jasa untuk mencapai tujuan dari perusahaan. LPD dapat tetap eksis dalam meningkatkan kinerja dengan perbaikan sumber daya manusia maupun dengan layanan sistem pelayanan jasa yang diberikan dengan baik secara cepat, tepat, dan aman agar mampu bersaing dengan bank-bank pemerintahan. Tentunya keberhasilan suatu LPD untuk mencapai tujuan utamanya tidak terlepas dari kinerja LPD itu sendiri. Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja mencakup kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Sehingga kinerja bisa dikatakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Untuk meningkatkan kinerja LPD maka perlu dilakukan beberapa pembenahan dari segi kinerja melalui penerapan *good corporate governance*.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu lembaga keuangan milik desa dan didirikan di desa untuk krama desa. Krama desa adalah orang-orang yang berada di suatu wilayah desa tertentu dan terikat oleh adat dan budaya desa. Peran pengelola LPD yang terpisah tidak menutup kemungkinan adanya tindakan mementingkan diri sendiri di pihak pengelola LPD dan mengabaikan kepentingan krama desa yang sering dikenal dengan konflik keagenan. Dimana pihak pengelola LPD adalah agen sedangkan krama desa adalah prinsipal. Pengelola LPD merupakan bagian yang mengetahui informasi dibandingkan dengan krama desa. Sehingga hal ini menjadi penyebab terjadinya asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan ketidaksetaraan informasi antara agen dan prinsipal, hal ini dikarenakan agen yaitu pengelola LPD lebih mengetahui informasi dari pada prinsipal yaitu krama desa. Untuk meminimalkan munculnya asimetri informasi, maka diperlukan penerapan *good corporate governance* untuk mengatasi masalah tersebut.

Dilihat dari situasi dan keadaan saat ini, kedatangan pandemi covid pada paruh pertama 2020 telah menyebabkan gangguan dan mengubah berbagai tatanan kehidupan yang diketahui sebelumnya. Adanya pandemi seolah menjadi pengingat betapa pentingnya keberlangsungan usaha, perusahaan perlu memperhatikan seluruh pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Semua menegaskan kembali perlunya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan budaya *tri hita karana*. Ariani et.al (2020), menyatakan *good corporate governance* merupakan pedoman bagi para pemimpin bisnis dalam mengelola tata kelola perusahaan yang baik dengan memperhatikan pemangku kepentingan di lingkungan LPD yaitu krama desa, pengelola dan masyarakat. Tujuan penerapan *good corporate governance* adalah untuk

meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap LPD itu sendiri. Dengan menerapkan *good corporate governance* akan menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang menguntungkan diri sendiri seperti penggelapan, korupsi yang dilakukan oleh oknum perusahaan itu sendiri sehingga secara otomatis meningkatkan nilai LPD yang tercermin dari kinerja keuangannya.

Putra & Sunarwijaya (2009), menyatakan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang baik terdiri dari lima komponen yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* atau kewajaran yang menjadi dasar pengembangan sistem tata kelola organisasi yang seharusnya dapat membimbing entitas menuju pengelolaan kinerja yang lebih baik. Dengan penerapan *good corporate governance* (GCG) yang tepat nantinya akan dapat mengambil keputusan yang menguntungkan organisasi dan secara otomatis akan meningkatkan kinerja LPD. Penerapan *good corporate governance* yang baik dalam pengelolaan LPD sangat penting karena secara langsung memberikan LPD pedoman yang jelas untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan pengelolaan LPD yang lebih baik sehingga meningkatkan nilai LPD.

Berhasilnya penerapan *good corporate governance* dalam sebuah organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi. Sastra & Erawati (2017), menyatakan pencapaian kinerja LPD yang terus berkembang tidak hanya di pengaruhi oleh sistem tata kelola perusahaan yang baik, tetapi juga faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja LPD yaitu nilai kearifan lokal *tri hita karana*. Dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik disebuah LPD ditambah dengan nilai kearifan lokal *tri hita karana* yang dijadikan sebagai landasan dalam setiap

kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pegawai, maka diharapkan kinerja dari LPD dapat mencapai tingkatan yang maksimal dan nantinya akan menguntungkan bagi semua pihak. Dengan adanya nilai kearifan *tri hita karana* dalam lingkungan kerja LPD akan memberikan suatu kondisi yang sesuai dengan perilaku pegawai dalam bekerja. Dengan penerapan nilai kearifan lokal *tri hita karana* yang baik dapat menghasilkan kinerja dan pencapaian yang cemerlang bagi individu, meningkatkan motivasi individu dalam hal kinerja dan prestasinya.

Saputra dan Komang Adi Kurniawan (2012) menyatakan, konsep *tri hita karana* merupakan konsep nilai budaya lokal yang telah tumbuh dalam tradisi masyarakat bali dan bahkan kini menjadi dasar filosofi bisnis, tata ruang, dan rencana strategik pembangunan daerah. Pada dasarnya organisasi yang memiliki pandangan kinerjanya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang muncul dari kekuatan sendiri, lingkungan kerja, dan hubungan antar rekan kerja. Oleh karena itu perlu mempertimbangan nilai kearifan lokal yang dapat membimbing setiap orang dan organisasi yang memahaminya. Implementasi *tri hita karana* dapat memperkuat level penalaran moral individu pegawai. Individu yang memiliki level penalaran moral tinggi memiliki motivasi utama bukan untuk kepentingan pribadinya. Hal ini memunjukan implementasi *tri hita karana* dapat membuat tingkah laku pegawai lebih jujur, bertanggung jawab, memiliki daya juang dalam bekerja sehingga pegawai akan lebih cenderung menjalankan pekerjaannya sesuai dengan peraturan perusahaan. *Tri hita karana* dapat dijadikan sebagai sistem nilai dan pedoman bagi anggota organisasi untuk berprilaku dan memenuhi kewajiban, tugas, dan tanggung jawab dalam organisasi.

Konsep *tri hita karana* merupakan konsep yang selalu dipertahankan oleh masyarakat hindu di Bali dimana meliputi, parahyangan yang berarti hubungan antara manusia dengan Tuhan, dimana parahyangan mengandung unsur yang terdiri dari bertakwa, penuh dedikasi dan kejujuran kepada sang pencipta. Pawongan yang berarti hubungan manusia dengan manusia, dimana pawongan mengandung unsur nilai etos kerja yang terdiri dari kreativitas, bekerja keras dalam bekerja, menghargai waktu, bekerja sama secara harmonis, bertindak efisien dan penuh inisiatif. Serta palemahan yang berarti hubungan manusia dengan lingkungan, yang mengandung unsur nilai kelestarian lingkungan yang terdiri dari membangun, memelihara, dan mengamankan. Dilihat pada tabel 1.1 berikut data klasifikasi kesehatan LPD pada LPD Kecamatan Pekutatan, Kecamatan Mendoyo, Kecamatan Jembrana, Kecamatan Negara dan Kecamatan Melaya.

Tabel 1.1
Data Klasifikasi Kesehatan LPD

2019					
Uraian	**Kec. Pekutatan**	**Kec. Mendoyo**	**Kec. Jembrana**	**Kec. Negara**	**Kec. Melaya**
Jumlah LPD	13 LPD	19 LPD	9 LPD	10 LPD	13 LPD
Sehat	12 LPD	16 LPD	8 LPD	9 LPD	10 LPD
Cukup Sehat	-	1 LPD	1 LPD	-	-
Kurang Sehat	1 LPD	-	-	1 LPD	1 LPD
Tidak Sehat	-	1 LPD	-	-	1 LPD
Tidak Operasi	-	1 LPD	-	-	-
2020					
Uraian	**Kec. Pekutatan**	**Kec. Mendoyo**	**Kec. Jembrana**	**Kec. Negara**	**Kec. Melaya**

Jumlah LPD	13 LPD	19 LPD	9 LPD	10 LPD	13 LPD
Sehat	12 LPD	14 LPD	7 LPD	9 LPD	11 LPD
Cukup Sehat	-	2 LPD	1 LPD	-	1 LPD
Kurang Sehat	1 LPD	2 LPD	-	1 LPD	-
Tidak Sehat	-	1 LPD	1 LPD	-	1 LPD

Sumber : LPLPD Kabupaten Jembrana (data diolah)

LPD yang akan menjadi fokus objek penelitian ini adalah LPD di Kecamatan Mendoyo Jembrana. Berdasarkan kabupaten, Badung dan Jembrana menjadi daerah terbanyak penindakan kasus korupsi. Kabupaten Jembrana paling sering terjadi korupsi pada intern LPD yang dimana korupsi terjadi bertahun-tahun. Berdasarkan tabel 1.1 LPD yang terdapat di Kecamatan Mendoyo Jembrana merupakan LPD dengan jumlah terbanyak dan pada tahun 2019 tercatat sebanyak satu LPD dalam kondisi tidak sehat dan satu LPD tidak beroperasi. Pada tahun 2020 terjadi penambahan tercatat dua LPD dalam kondisi kurang sehat dan satu LPD yang tergolong tidak sehat. Seiring dengan permasalahan yang ada, hal ini membuktikan bahwa kondisi LPD yang kurang sehat dan tidak sehat muncul karena pengelolaan lembaga yang kurang dan cara mengatasinya adalah dengan penerapan *good corporate governance* dan penerapan nilai kearifan lokal *tri hita karana*. Dilihat dari tabel 1.1 adanya penambahan dua LPD yang tergolong kurang sehat dan satu LPD yang tergolong tidak sehat terdapat keraguan tentang bagaimana tata kelola yang dilaksanakan oleh LPD itu sendiri. LPD yang kini menjadi lembaga keuangan non bank yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan desa harus menerapkan *good corporate governance* untuk

meningkatkan kinerja LPD. Kajian tentang tata kelola LPD yang mengedepankan prinsip-prinsip GCG merupakan faktor yang sangat penting. Dengan penerapan *good corporate governance* mengantarkan organisasi pada pencapaian visi dan misi LPD.

Koordinator Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kabupaten Jembrana menyatakan rendahnya aset LPD di Kabupaten Jembrana disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya yaitu rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LPD di beberapa tempat yang dimana dengan adanya kasus penggelapan dana di LPD Mendoyo Dauh Tukad dan uang nasabah yang digelapkan mencapai 4 juta rupiah. Berdasarkan kasus yang dijelaskan, hal ini membuktikan bahwa sistem pengelolaan LPD masih kurang baik dan cara yang dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan menerapkan *good corporate governance*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan LPD yaitu *tri hita karana* yang lemah. *Tri hita karana* merupakan filosofi yang menjadi konsep kehidupan dan sistem kebudayaan masyarakat di Bali. Pedoman kehidupannya berdasarkan pada prinsip keselarasan, kebersamaan, keseimbangan antara tujuan ekonomi, kelestarian lingkungan dan budaya, estetika dan spiritual. Selain itu juga didukung dengan adanya program Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang menyelenggarakan *tri hita karana awards* yang semakin menumbuhkan implementasi ajaran *tri hita karana* dalam kehidupan sehari-hari terutama pada pekerjaan (Mustikayani dan Dwirandra, 2016). Adanya penerapan *good corporate governance* dan *tri hita karana* dalam lingkungan kerja LPD dapat mampu menciptakan suasana kerja yang terstruktur, transparan, harmonis, dan mengubah pola pikir modernisasi dan materialisme untuk meningkatkan kinerja yang baik.

Kesenjangan antara teori dengan kenyataan dikutip pula dengan inkonsistensi beberapa hasil penelitian terdahulu. Astini, dkk (2019), menyatakan variabel *good corporate governance* dan *tri hita karana* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil berbeda (*research gap*) didapatkan oleh hasil penelitian Ariani, dkk (2020) menyatakan, *good corporate governance* dan *tri hita karana* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan LPD.

Berdasarkan pemaparan latar belakang dimana adanya ketidakkonsistenan penelitian dan dilihat kurangnya tindak pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa. Adanya hal tersebut dikarenakan lemahnya penerapan dalam tata kelola perusahaan yang menjadi faktor internal dan lemahnya nilai kearifan lokal *tri hita karana* yang menjadi faktor eksternal, maka peneliti ini tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Tri Hita Karana* terhadap Kinerja LPD di Masa Pandemi Covid-19 pada LPD Kecamatan Mendoyo Jembrana" .**

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

(1) Berdasarkan dari data Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) pada LPD Kecamatan Mendoyo Jembrana tingkat kesehatan yang kurang sehat dan tidak sehat terus terjadi setiap tahunnya. Hal ini diakibatnya kurangnya kinerja LPD yang dapat dilihat dengan adanya permasalahan tindak kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dan adanya LPD yang tidak beroperasi dengan baik.

(2) Adanya keterbatasan pada penelitian-penelitian terdahulu yang mengindikasikan munculnya ketidakseragaman hasil penelitian.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian ini lebih fokus pada permasalahan kinerja keuangan di masa pandemi covid-19 pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Mendoyo Jembrana . Penelitian ini menguji pengaruh *good corporate governance* dan *tri hita karana* terhadap kinerja LPD di masa pandemi covid-19 pada LPD Kecamatan Mendoyo Jembrana.

1.4. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

(1) Apakah ada pengaruh *good corporate governance* dan *tri hita karana* terhadap kinerja LPD di masa pandemi covid-19 pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Mendoyo Jembrana?

(2) Apakah ada pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja LPD di masa pandemi covid-19 pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Mendoyo Jembrana?

(3) Apakah ada pengaruh *tri hita karana* terhadap kinerja LPD di masa pandemi covid-19 pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mendoyo Jembrana?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hal-hal berikut :

(1) Pengaruh *good corporate governance* dan *tri hita karana* terhadap kinerja LPD di masa pandemi covid-19 pada LPD Kecamatan Mendoyo Jembrana.

(2) Pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja LPD di masa pandemi covid-19 pada LPD Kecamatan Mendoyo Jembrana.

(3) Pengaruh *tri hita karana* terhadap kinerja LPD di masa pandemi covid-19 pada LPD Kecamatan Mendoyo Jembrana.

1.6. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

(1) Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dalam pengembangan ilmu manajemen keuangan yang berkaitan dengan penelitian *good corporate governance*, *tri hita karana* dan kinerja LPD di masa pandemi covid-19.

(2) Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan masukan kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) khususnya di wilayah Kecamatan Mendoyo mengenai pentingnya penerapan *good corporate governance* dan *tri hita karana* terhadap kinerja LPD pada LPD Kecamatan Mendoyo Jembrana.